

DRAMA TKA PERDANA DI ERA PRABOWO

Live TikTok Kala Ujian hingga Listrik Padam

Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang untuk pertama kalinya digelar di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berlangsung dalam atmosfer penuh harapan sekaligus kecemasan. Pemerintah menempatkan TKA sebagai fondasi baru sistem evaluasi pendidikan nasional. Namun hari-hari pertama pelaksanaannya justru dipenuhi rangkaian insiden yang mengundang perhatian publik. Mulai dari drama siswa yang menyiarkan jalannya ujian lewat TikTok hingga sekolah-sekolah yang terpaksa menghentikan sesi karena listrik padam. Menurut data, sebanyak 1.952.683 peserta yang menjalani TKA di hari pertama, Senin (3/11/2025). Angka tersebut menunjukkan 97,9 persen dari total peserta hari pertama yang daftar.

BACA HAL 11...

Sejumlah siswa mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) di SMAN 1 Enrekang, Sulawesi Selatan, Senin (3/11/2025).
(Dok. Kemendikdasmen)

Data Utama Pelaksanaan TKA Hari Pertama

Total peserta terdaftar: **sekitar 1.952.683 siswa**.
Persentase keikutsertaan hari pertama: **97,9%**.
Peserta yang belum mengikuti TKA karena gangguan teknis: **2,1%**.

Moda Pelaksanaan

Daring: **1.583.762 siswa**.
Semi-Daring: **368.918 siswa**.

Sekolah Pelaksanaa

Daring : **22.172 sekolah**
Semi-Daring : **4.530 sekolah**

Kategori Pelanggaran TKA

- 1. Pelanggaran Ringan**
terlambat, duduk salah, barang tidak ditaruh benar, daftar hadir tidak diisi.
- 2. Pelanggaran Sedang**
login akun salah, keluar tanpa izin, tidak lapor gangguan, buat kegaduhan.
- 3. Pelanggaran Berat**
joki, identitas tidak sesuai, bawa catatan/ponsel/kalkulator, rekam soal, mencontek, bantuan eksternal.

Jenis Sanksi

- Peringatan lisan dari pengawas ruang.
- Pembatalan ujian oleh penyelenggara daerah untuk pelanggaran tertentu.
- Diskualifikasi langsung jika terbukti melanggar berat.
- Dikeluarkan dari ruang ujian dan diberi nilai nol (0) jika pelanggaran berat terkonfirmasi setelah investigasi pusat.

Prosedur Pengawasan

- Setiap ruangan memiliki dua pengawas/proktor.
 - Semua temuan pelanggaran wajib dicatat dalam berita acara dan dilaporkan ke pusat.
 - Pemantauan terhubung dengan pusat melalui Zoom untuk me-monitor seluruh ruangan.
- Sumber: *Mendikdasmen dan Kepmendikdasmen Nomor 95 Tahun 2025*

KAI TAMBAH GERBONG KRL DAN SIAPKAN KERETA PETANI

Pemerintah bergerak cepat menjawab keluhan penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek yang kerap berdesakan pada jam sibuk. Usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (3/11/2025), PT Kereta Api Indonesia (KAI) menegaskan bakal menambah rangkaian kereta pada layanan Commuter Line sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. KAI juga menyiapkan inovasi lain yang berpihak pada sektor riil, khususnya di wilayah Banten. Melalui KAI Commuter, perusahaan menyiapkan pengoperasian Kereta Petani dan Pedagang.



Gerbong kereta api khusus untuk petani dan pedagang. (Dok. KAI)

Penambahan kapasitas KRL dipandang mendesak, mengingat jutaan pekerja di wilayah metropolitan bergantung pada KRL sebagai moda transportasi utama setiap hari.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan Presiden memberi perhatian khusus pada kondisi KRL saat rush hour yang dinilai tidak lagi memadai. Ia menjelaskan kepada Presiden mengenai kondisi lapangan, termasuk padatnya gerbong pada pagi dan sore hari. Presiden, lanjut Bobby, langsung meminta percepatan penambahan rangkaian.

“Beliau sampaikan bahwa harus senyaman mungkin. Tadi saya jelaskan juga bahwa sekarang itu pada jam sibuk, KRL kita itu sudah berdempet-dempetan, beliau sangat ‘concern’ sekali dengan itu, maka beliau sampaikan secepatnya, agar impact bagi rakyat sangat positif sekali, secepatnya kita akan menambah gerbong,” ujar Bobby.

Selain kapasitas, Presiden juga menekankan bahwa pengelolaan KRL harus mencerminkan standar peradaban negara modern. Ia meminta agar fasilitas di gerbong, stasiun, hingga lintasan ditingkatkan. Kebersihan, keamanan, hingga akses ramah perempuan menjadi sorotan.

“Tambahkan gerbong, perbaikan gerbong yang ada, nyamakan penumpang terutama yang perempuan, stasiun, lintasan kereta dan gerbong harus bersih, terutama peningkatan-peningkatan fasilitas di stasiun, fasilitas operasi yang ada di lintasan, dan bahkan juga meningkat-

kan infrastruktur dari lintasan yang ada,” kata Bobby menyampaikan arahan Presiden.

Untuk memenuhi instruksi tersebut, KAI telah menyiapkan tambahan rangkaian yang diproduksi oleh PT Industri Kereta Api (INKA) maupun perusahaan manufaktur kereta asal China. Dari pesanan 11 train set dari China, delapan di antaranya telah beroperasi penuh, sementara tiga sisanya tengah

menjalani serangkaian technical qualification. Ketiganya ditargetkan mulai melayani penumpang bulan ini sehingga seluruh pesanan rampung beroperasi sebelum akhir tahun.

Di sisi lain, 12 rangkaian dari INKA juga dipesan untuk memperkuat kebutuhan angkutan harian Jabodetabek. Hingga awal November ini, empat unit telah diterima KAI dan sedang memasuki tahap pengujian. Bobby menargetkan seluruh rangkaian dari INKA sudah dapat beroperasi pada pertengahan tahun depa.

Tak hanya KRL, Presiden Prabowo turut meminta perhatian pada layanan LRT Jabodebek. Perbaikan aspek keselamatan, kebersihan, dan kenyamanan diminta menjadi prioritas. Menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru, Presiden juga meminta KAI memetakan titik-titik rawan seperti jalur yang sering terlanda banjir dan lokasi berisiko longsor.

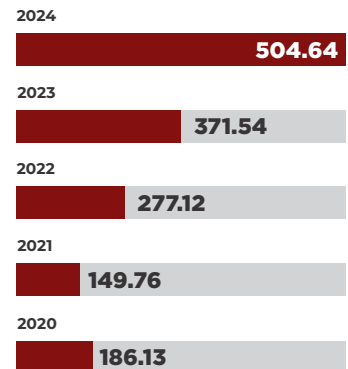
“Beliau juga memerintahkan kami untuk mengecek secara detail daerah-daerah rawan, terutama daerah rawan banjir, daerah rawan longsor dalam hal ini,” tutur Bobby.

Di tengah dorongan peningkatan layanan bagi pengguna harian KRL, KAI juga menyiapkan inovasi lain yang

berpihak pada sektor riil, khususnya di wilayah Banten. Melalui KAI Commuter, perusahaan menyiapkan pengoperasian Kereta Petani dan Pedagang, sebuah moda angkutan berbasis rel yang dirancang untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan barang dagangan lokal.

Kereta khusus tersebut pertama kali diperkenalkan Balai Yasa Surabaya Gubeng pada 15 Agustus 2025. Setelah sukses menjalani uji lintas perdana, rangkaian kini memasuki tahap penyempurnaan konsep operasional. Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menjelaskan bahwa layanan ini akan membantu petani mengirim hasil panen ke pasar dengan biaya lebih ringan dan waktu yang lebih terukur. (ant,rls,tin/dya)

JUMLAH PENUMPANG KERETA API (JUTA JIWA)



kerakyatan ini. Memang kalau diminta sempurna dari awal mungkin tidak. Tapi kan ini perbaikannya pelan-pelan gitu ya, mestinya jalan. Jadi diskusinya itu saja sih, enggak ada yang lain,” tutur Jonan.

Seiring mencuatnya isu utang Kereta Cepat Whoosh, publik sempat menduga kedatangan Jonan berkaitan dengan proyek tersebut. Namun Jonan dengan tegas membantah adanya pembahasan mengenai kereta cepat dalam pertemuannya.

“Enggak, enggak, enggak. Saya enggak diminta masukan kok soal itu. Saya sudah pensiun, saya enggak menyampaikan pendapat,” ucapnya. (wid,war,rls/dya)

Jonan Bertemu Prabowo 2 Jam di Istana, Bahas Whoosh?

MANTAN Menteri Perhubungan dan eks Direktur Utama PT KAI, Ignatius Jonan, mendatangi Istana Kepresidenan pada Senin (3/11/2025). Ia bertemu Presiden Prabowo Subianto selama sekitar dua jam. Seusai pertemuan, Jonan menegaskan bahwa diskusi mereka tidak berkaitan dengan utang dan polemik Kereta Cepat Whoosh, tetapi fokus pada sejumlah program kerakyatan yang saat ini dijalankan pemerintah.

Jonan menyebut kedatangannya untuk berdialog sekaligus menyampaikan apresiasi atas kebijakan-kebijakan yang menurutnya memberi dampak langsung bagi masyarakat. “Puji Tuhan beliau berkenan untuk mendengarkan dan diskusi dan menerima itu banyak beberapa masukan. Kami juga sharing tentang

peran serta beliau yang sangat bagus dan aktif diplomasi luar negeri juga di pengembangan BUMN dan partisipasi BUMN untuk bangsa dan negara yang lebih banyak juga program-program yang sifatnya itu kerakyatan,” ujar Jonan, seperti disampaikan kepada wartawan.

Menurut Jonan, Presiden Prabowo meminta pandangan mengenai arah pengembangan BUMN serta bagaimana lembaga-lembaga negara dapat lebih hadir dalam pembangunan nasional dan penguatan fondasi ekonomi rakyat.

Ia menyoroti bahwa kebijakan seperti program makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat berpotensi menciptakan efek ekonomi berantai yang besar. “Ekonominya menurut saya secara perlahan mungkin akan tumbuh ya dengan program

Dalam pemaparannya, Ismail Fahmi mengkritik minimnya kecepatan DPR merespons isu yang berkembang. Ia mencontohkan demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 yang dipicu oleh potongan video beberapa anggota DPR. Menurutnya, potongan pendek itu lepas dari konteks dan memicu sentimen negatif di masyarakat.

“Ketika ada sebuah isu, saya kira menjadi tanggung jawab kita juga ketika ada isu, itu kena dengan kita dan kita merasa nggak pas, kita harus segera klarifikasi,” ujar Ismail di ruang sidang MKD, Senin (3/11/2025).

Ismail menegaskan, persepsi publik dengan mudah terbentuk ketika sebuah narasi viral tanpa penjelasan resmi. Ia menyebut potongan video itu terus menyebar dan dianggap benar karena pihak terkait tidak segera muncul untuk memberikan klarifikasi.

“Saat itu enggak segera klarifikasi. Jadi publik pun, seperti saya bilang tadi, ketika ada sesuatu yang dibelokkan, dianggap sebuah kebenaran. Dan akan viral terus menerus selama tidak ada klarifikasi segera itu juga akan dipercaya sebagai kebenaran,” tegasnya.

Ismail juga memetakan narasi soal aksi demonstrasi sudah berkembang jauh sebelum tanggal aksi. Ia menyebut tren di TikTok, Instagram, hingga Twitter telah mengarahkan isu tertentu ke DPR. “Saya lihat ini seperti bukan dari buruh ya, misalnya mulai diarahkan ke DPR,” ungkap Ismail.

Termasuk soal video joget anggota DPR dalam sidang tahunan, yang kemudian dituding sebagai selebrasi kenaikan gaji. Menurut Ismail, klarifikasi datang terlambat. “Saya juga heran ini kenapa, kalau seandainya salah, tidak ada klarifikasi cepat. Klarifikasi itu datangnya lama sekali,” katanya.

Sosiolog Sebut Tak Ada Unsur Pelanggaran Etik

Sesi kedua menghadirkan sosiolog Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, yang menilai bahwa inti masalah bukan pada ucapan para anggota DPR nonaktif, tetapi pada bagaimana narasi tersebut diputarbalikkan di media sosial hingga kehilangan konteks.

Terkait ucapan Adies Kadir mengenai tunjangan rumah bagi anggota dewan, yang menjadi pemicu salah paham publik, Trubus menegaskan bahwa hal itu bukan pelanggaran etik. Ia justru melihat pernyataan Adies sebagai bagian dari tugas dewan memberi informasi kepada masyarakat.

“Dalam sosiologis bukan merupakan pelanggaran, karena itu bagian dari tupoksinya,” kata Trubus dihadapan MKD.

Trubus menilai langkah Adies

Sidang MKD Terhadap Sahroni Cs

AHLI SINDIR RESPONS LAMBAN DPR

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kembali menggelar sidang etik terhadap lima anggota DPR nonaktif. Mereka adalah Ahmad Sahroni, Nafa Urbach (NasDem), Eko Patrio dan Uya Kuya (PAN), serta Adies Kadir (Golkar). Dua ahli dihadirkan yaitu Ismail Fahmi dari Drone Emprit dan sosiolog Trubus Rahardiansyah. Keduanya menilai problem utama kasus ini bukan sekadar soal ucapan para anggota dewan, tetapi bagaimana reaksi DPR yang dianggap terlalu lambat menghadapi narasi negatif yang terlanjur viral di media sosial.



Ahli media sosial Ismail Fahmi di Ruang MKD DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/11/2025). Ist

melakukan klarifikasi sudah tepat.

“Dengan meralat itu memperkuat bahwa dewan memberikan kepada publik informasi yang utuh,” ujarnya.

Ia juga menyoroti mudahnya manipulasi informasi di era digital.

“Menurut saya kemudian dipersepsikan oleh sebagian sebagai sesuatu yang positif, tetapi kemudian seolah-olah menjadi negatif karena dimanipulasi itu,” jelasnya.

Selain Adies, MKD juga

mengangkat pernyataan Sahroni yang menggunakan kata “tolol” saat menanggapi isu pembubaran DPR. Ucapan itu viral dan menjadi pemicu amuk massa hingga rumahnya dirusak serta dijarah. Namun Trubus memandang konteks ucapan itu bukan serangan personal maupun kelompok. (wid,ant,rls/dya)

5 ANGGOTA DPR RI JALANI SIDANG ETIK DI MKD



Adies Kadir

Disidang karena pernyataan keliru soal tunjangan DPR yang memicu reaksi publik. Laporan masuk ke MKD pada 4, 9, dan 30 September 2025.



Nafa Urbach

Dipersoalkan akibat komentar di media sosial tentang kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang dianggap hedon dan tidak peka. Ia kemudian meminta maaf lewat video di Instagram.



Ahmad Sahroni

Dilaporkan atas ucapan tidak pantas di publik terkait pembubaran DPR dan tanggapannya terhadap demonstran.



Eko Patrio

Disidang karena berjoget saat Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI pada 15 Agustus, dianggap merendahkan lembaga.



Uya Kuya

Juga dilaporkan karena berjoget di sidang tahunan yang sama, dinilai mencoreng wibawa DPR.

Duga Penjarahan Rumah Politikus Sudah Ditargetkan

SIDANG etik terhadap lima anggota DPR di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada Senin (3/11/2025) menghadirkan sejumlah pakar dalam rangkaian agenda “Sidang Bersama Permintaan Keterangan Saksi dan Pendapat Ahli”. Salah satu ahli yang memberikan pandangannya adalah Prof. Drs. Adrianus Meliala Sembiring, kriminolog dari Universitas Indonesia.

Dalam pemaparannya, Adrianus menekankan dampak serius persebaran informasi bohong di ruang digital, terutama setelah aksi demonstrasi besar di kompleks DPR pada Agustus lalu. Ia menyebut bahwa penyebaran hoaks tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan gesekan sosial serta menambah kesalahpahaman publik terhadap institusi negara.

Adrianus menegaskan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas

terhadap para pelaku yang menyebarkan hoaks.

“Saya setuju hukum dipergunakan secara tegas, tanpa pandang bulu. Bahwa ada pembuat hoaks yang dimaafkan, bisa dimediasikan, itu bagus juga tetapi mungkin akan memberi satu sinyal yang salah bagi banyak orang bahwa, ‘oh its okay ya membuat hoaks’, atau ‘oh its okay ya menyakiti orang’, itu yang saya kira perlu dipertimbangkan,” ujar Adrianus Eliasta dalam persidangan MKD DPR RI, Senin (3/11/2025).

Sehubungan dengan itu, saat ditanya oleh salah satu hakim MKD, Rano Alfath, terkait provokasi tragedi penjarahan, Adrianus menyebut adanya targeted looting yang turut dikemas melalui media sosial.

“Ada 10 rumah tapi hanya rumah-rumah tertentu yang dijarah. Ini yang menunjukkan adanya targeted looting, penjarahan yang memang ditargetkan, bukan spontan. Yang kedua, sebagai akademik, saya

melihat dari video yang beredar (di-edit) seakan-akan ada hubungan langsung dengan penjarahan,” jelasnya.

Ia kemudian turut menjelaskan faktor yang memengaruhi dan juga efek yang ditimbulkan setelahnya, memberikan sinyal kepada orang-orang untuk melakukan hal serupa, yaitu penjarahan dan pembakaran.

“Dari video-video itu lalu memengaruhi putusan orang, untuk kemudian melakukan tindakan penjarahan. Dan ditambah adanya triggering, pencetus, ajakan-ajakan untuk kumpul di sini, bakar Monas, serang Mabes Polri,” tambahnya. (war,ist/dya)

DITEKAN ISU KOTA HANTU, MENKEU PURBAYA: JANGAN PERCAYA PREDIKSI ASING

Pemerintah pusat menegaskan komitmen penuh terhadap keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) di tengah maraknya pemberitaan media asing yang menyebut IKN berpotensi berubah menjadi “ghost city”. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa langsung menepis anggapan tersebut dan menegaskan bahwa perkembangan IKN nyata, terukur, dan terus bergerak maju. Bahkan saat ini telah dimulai pembangunan Kompleks Perkantoran Lembaga Legislatif dan Yudikatif.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembangunan tidak tersendat. Narasi negatif dari luar negeri kerap tidak sesuai realitas.

“Jangan terlalu percaya dengan prediksi media luar negeri. Mereka sering keliru membaca arah pembangunan ekonomi Indonesia,” ujar Purbaya usai Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (3/11/2024).

“Kalau kata saya, IKN tidak akan jadi kota hantu. Perekonomian Indonesia sudah makin kuat, dan itu akan mendukung keberlanjutan pembangunan di IKN,” tegasnya.

Pemerintah telah memberi izin kepada perusahaan swasta untuk membangun perumahan dan fasilitas pendukung IKN. “Yang sudah disetujui itu perusahaan swasta yang membangun rumah di sana. Harusnya sekarang sudah mulai jalan pembangunannya. Kalau nanti perlu tambahan dana dari pemerintah, bisa dialokasikan tahun depan,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan fisik hanya satu aspek; stabilitas ekonomi nasional adalah jaminan masa depan IKN. “Kalau ekonomi kita terus tumbuh, kepercayaan investor meningkat, dan itu otomatis akan menjaga denyut kehidupan di IKN,” ujarnya.

Dengan proyek-proyek besar yang terus digarap, pemerintah memastikan bahwa label “kota hantu” sama sekali tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Mesin pembangunan bergerak cepat, investasi mengalir, dan fondasi institusi negara tengah ditancapkan.

Dalam perspektif Purbaya, IKN bukan sekadar pemindahan administrasi pemerintahan, tetapi simbol visi peradaban baru Indonesia. “IKN akan menjadi simbol peradaban baru Indonesia, bukan sekadar pusat administrasi,” katanya.

Investasi Rp 3 Triliun Ditekan

Di saat pernyataan itu mencuat, IKN justru memasuki fase penting yaitu dimulainya pembangunan Kompleks Perkantoran Lembaga Legislatif dan Yudikatif, tonggak utama IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Otorita IKN secara resmi menandatangani kontrak pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada Jumat (31/10/2025).

Ini menjadi penanda penting



Praktik tambang ilegal di area konservasi orangutan dan beruang madu di kawasan konservasi BOSF Samboja. Tambang ilegal ini tidak jauh dari wilayah IKN Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara. (Humas Polda Kaltim)

pergeseran fokus dari pembangunan istana dan infrastruktur dasar menuju pembentukan ekosistem inti lembaga negara.

Total investasi yang diteken mencapai Rp 3 triliun, mencakup

pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif sepanjang 6,418 km senilai Rp 1,9 triliun, dan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A sepanjang 5,399 km bernilai Rp 1,1 triliun.

Keduanya akan dikerjakan hingga

DPR Sentil OIKN: Perbaiki Komunikasi

ANGGOTA Komisi II DPR Muhammad Khozin menyoroti serius pemberitaan The Guardian yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) terancam menjadi “ghost city”. Ia meminta Otorita IKN (OIKN) merespons kritik tersebut dengan kinerja yang lebih transparan, terukur, dan komunikatif.

Khozin menyebut istilah “kota hantu” adalah label peyoratif yang bisa mencoreng citra Indonesia di mata internasional. “Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN,” ujar Khozin.

Ia mengingatkan bahwa persepsi negatif dari luar negeri harus segera dinetralisir dengan pembuktian di lapangan. “Jika pemberitaan pesimistis tidak dimitigasi, maka berpotensi berdampak pada citra buruk IKN,” tegasnya.

Menurut Khozin, menjaga citra IKN penting bukan hanya untuk publik, tetapi juga untuk menarik investor asing yang sangat memperhatikan konsistensi informasi. Ia meminta OIKN mempublikasikan progres pembangunan secara berkala agar tidak memberi ruang

bagi narasi liar luar negeri.

“Di antara cara yang bisa ditempuh, dengan perbaikan pola komunikasi publik,” katanya.

Khozin juga menekankan secara politik masa depan IKN sudah final. Perpres Nomor 79 Tahun 2025 menetapkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik. “Pesan politik dari Perpres ini, pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen atas pembangunan dan masa depan IKN. Mestinya ini menjadi trigger bagi kinerja OIKN,” ujar dia.

Ia menyebut dukungan regulasi sudah sangat jelas sehingga “IKN kota masa depan, bukan kota hantu.”

Khozin mengingatkan, tak cukup hanya bekerja. Publik juga harus diberi akses atas data dan progres agar IKN tidak terus dihantui narasi negatif dari media asing.

“Komunikasi publik itu bagian dari pembangunan. Kalau itu gagal, persepsi publik juga gagal,” ujarnya.

Berdasarkan catatan OIKN, sejak proyek berjalan pada 2022 hingga akhir 2024, pembangunan telah menghabiskan Rp 89 triliun APBN. Dana tersebut mencakup pem-

2027 dalam skema multiyears contract. Infrastruktur yang dibangun tidak sekadar jalan biasa, tetapi dilengkapi Multi Utility Tunnel (MUT), jaringan mekanikal-elektrikal, jalur pedestrian, jalur sepeda, hingga jembatan pelengkung dan struktur penahan tanah. (gus,ant,rla/dya)

INVESTASI IKN YANG MULAI BERJALAN

○ INFRASTRUKTUR JALAN (RP 3 TRILIUN)

Fokus pada akses menuju Kompleks Legislatif dan Yudikatif.

Jalan Kawasan Yudikatif:
Rp 1,9 T, 6,4 km (Okt 2025–Des 2027).

Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A:
Rp 1,1 T, 5,4 km (Okt 2025–Nov 2027).

○ MANAJEMEN KONSTRUKSI INDIK (RP 8,5 MILIAR)

Untuk pengawasan mutu, integrasi, dan keberlanjutan proyek.

Diawasi langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

○ INFRASTRUKTUR BAWAH TANAH (MUT)

Termasuk jaringan utilitas, jalur pedestrian, jembatan pelengkung, dan struktur penahan tanah.

Mendukung konsep smart forest city tanpa kabel udara.

○ BATCH 2 TAHAP 2 (2025–2027)

13 paket konstruksi besar (kantor lembaga tinggi negara, air minum, SDA, dll.).

12 paket manajemen/supervisi.

Mulai akhir November 2025.



bangunan jalan tol, jembatan, kantor pemerintahan, hingga bandara.

Total realisasi APBN yang diumumkan Kemenkeu sampai Januari 2025 mencapai Rp 75,8 triliun, sementara finalisasi 2024 dan penyisiran ulang anggaran menaikkan jumlah total ke Rp 89 triliun. (nov,ist/dya)

MENIMBANG BANSOS BERAS DAN TUNAI DIKAJI ULANG

Ekonom Sebut Tepat Meski Terlambat

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) kembali memunculkan wacana evaluasi menyeluruh terhadap pola bantuan sosial yang selama ini digulirkan pemerintah. Alasannya, kebijakan itu tidak produktif. Sejumlah ekonom menilai pentingnya model conditional cash transfer seperti PKH agar bantuan tidak sekadar habis dikonsumsi, tetapi turut membangun kapasitas lewat pendidikan, kesehatan, dan pelatihan vokasi.

Para ekonom yang menilai gagasan evaluasi bansos layak dibahas, terutama jika diarahkan pada skema yang mampu meningkatkan keahlian dan daya saing masyarakat berpendapatan rendah.

Ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet, menyebut jika tujuannya meningkatkan produktivitas, maka model bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dijadikan rujukan. Ia menilai PKH relevan karena mengadopsi pola conditional cash transfer, di mana penerima bantuan wajib memenuhi syarat tertentu yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup.

"Seperti memastikan anak bersekolah, mengikuti pemeriksaan kesehatan, atau bahkan berpartisipasi dalam pelatihan vokasi dan kewirausahaan. Dengan begitu, bansos bukan hanya alat konsumsi sementara, tapi juga sarana membangun human capital dan kemandirian ekonomi," kata Yusuf, Senin (3/11/2025).

Ia menegaskan bahwa meskipun bansos didefinisikan sebagai bantuan non-resiprokal, bukan berarti skemanya tak bisa dirancang untuk menciptakan nilai ekonomi jangka panjang. "Pemerintah bisa merumuskan regulasi yang membuat bansos berperan sebagai investasi sosial," tambahnya.

Pendapat senada disampaikan Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira. Ia membandingkan Indonesia dengan negara maju, di mana bantuan tunai kerap menjadi instrumen untuk meningkatkan keterampilan. "Di negara maju modelnya adalah universal basic income. Studi yang dilakukan Rutger Bregman justru menemukan manfaat bansos tunai pada individu miskin. Uangnya selain dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari juga digunakan untuk training keahlian," ujarnya.

Menurut Bhima, infrastruktur kebijakan perlu dirapikan agar bansos di Indonesia tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif.

Dari Universitas Paramadina, ekonom Wijayanto Samirin menilai usulan evaluasi bansos ini "tepat, meski terlambat".

Ia menilai salah satu penyebab ekonomi Indonesia sulit tumbuh di atas 5 persen adalah produktivitas masyarakat yang rendah. "Salah satu kenapa ekonomi kita sulit tumbuh di atas 5 persen adalah produktivitas yang rendah. Salah satu faktor penting adalah program sosial kita mengedepankan pendekatan konsumsi, pendekatan memberi ikan, pendekatan tangan di atas," jelasnya.

Menurutnya, pendekatan berbasis konsumsi memang menguntungkan secara politik, namun berdampak buruk bagi pembentukan mentalitas kerja jangka panjang. "Secara politik, ini bermanfaat karena populis, tetapi

secara ekonomi ini justru berdampak negatif. Produktivitas dan semangat berjuang tidak terbangun, justru mental menunggu uluran tangan," ujar Wijayanto.

Ia mengingatkan bahwa pendekatan konsumtif tidak berkelanjutan karena manfaatnya berhenti begitu bantuan dihentikan. Ia menyarankan agar pemerintah mengarahkan anggaran bansos ke pembangunan proyek padat karya, irigasi, atau infrastruktur desa yang dapat menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan nilai produktif masyarakat.

Zulhas sendiri menggarisbawahi bahwa Indonesia pernah berada pada posisi lebih unggul dibanding beberapa negara yang kini telah melesat jauh. Ia menyinggung masa 1980-an ketika Indonesia mampu memproduksi pesawat, baja, hingga

petrokimia.

"Tahun 80-an dibanding dengan Tiongkok, GDP kita lebih tinggi," ujarnya, sembari menyebut bahwa kini Indonesia justru tertinggal dari Malaysia dan Thailand.

"Malaysia sekarang income per kapita 12 ribu USD, Thailand hampir 8 ribu, kita masih 4 ribu lebih. Kenapa? Karena mereka produktif." (tin,rls,ant/dya)



Warga penerima manfaat membawa beras dalam karung saat pengambilan bantuan pangan cadangan beras di Balai Kelurahan Bangsal, Kediri, Jawa Timur. (Dok. ant)

BPS: Harga Beras Turun di Semua Tingkatan

HARGA beras di Indonesia menunjukkan tren penurunan pada Oktober 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga beras turun di semua tingkat perdagangan, mulai dari penggilingan, grosir, hingga eceran.

Namun, jika dibandingkan dengan tahun lalu, harganya masih lebih tinggi. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengatakan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan turun menjadi Rp 14.439 per kilogram.

Angka ini turun 0,54 persen secara bulanan (month to month/mtm), tapi masih naik 5,62 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Jika dilihat menurut kualitasnya, harga beras premium di tingkat penggilingan turun 0,71 persen

secara bulanan, tetapi naik 4,96 persen secara tahunan. Sementara beras medium turun 0,46 persen secara bulanan, namun naik 6,13 persen secara tahunan," kata Pudji dalam konferensi pers, Senin (3/11/2025).

Penurunan juga terjadi di tingkat grosir dan eceran. Di tingkat grosir, harga beras rata-rata Rp 14.264 per kilogram, turun 0,18 persen dibanding bulan sebelumnya dan naik 5,26 persen dibanding tahun lalu.

Sementara di tingkat eceran, harga beras turun 0,27 persen secara bulanan menjadi Rp 15.341 per kilogram, tapi masih lebih mahal 3,86 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. "Harga beras yang kami sampaikan ini merupakan rata-rata yang mencakup berbagai jenis kualitas dan wilayah di seluruh

5 BANSOS YANG CAIR NOVEMBER 2025

- PIP**
Bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Pencairan sudah masuk termin ketiga (Oktober–Desember 2025) dan langsung masuk ke rekening penerima.
- PKH**
Memasuki pencairan tahap keempat pada November 2025. Penyaluran dilakukan bertahap melalui bank penyalur di seluruh daerah.
- BPNT**
KPM menerima bantuan pangan Rp 200.000 per bulan yang dicairkan tiap 3 bulan sekali, sehingga total Rp 600.000. Bantuan berupa saldo elektronik untuk belanja pangan di e-warung.
- BLT KESRA**
Tambahan bantuan kesejahteraan sebesar Rp 900.000 per penerima, dicairkan bertahap untuk menjaga daya beli masyarakat.
- BANTUAN BERAS & MINYAK GORENG**
Penyaluran 10 kg beras dan 2 liter MinyakKita pada Oktober–November 2025 guna memperkuat ketahanan pangan dan meringankan beban keluarga.

Indonesia," ungkapnya.

BPS memperkirakan produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton. Jumlah itu meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan tahun 2024. Perkiraan ini berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) per Oktober 2025. (wid,rls/dya)

Cuaca Ekstrem Terjang Kabupaten Malang 8 Bencana Hidrometeorologi dalam 2 Hari



Kondisi salah satu rumah warga di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang pasca diterjang angin kencang, Minggu (2/11/2025). (dok. Pusdalops BPBD Kab Malang)

MALANG- Cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Malang pada 1-2 November 2025 memicu 8 kejadian bencana hidrometeorologi di sejumlah kecamatan.

Laporan resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten Malang mencatat, bencana tersebut mengakibatkan dua orang luka, dua orang masih dalam pencarian, dan 102 rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi.

"Dari data kami, delapan kejadian itu terdiri atas tiga tanah longsor, satu banjir, satu cuaca ekstrem, dan tiga peristiwa pohon tumbang. Peristiwa tersebut tersebar di tujuh kecamatan, yakni Ngantang, Dau, Pagak, Kepanjen, Gondanglegi, Dampit, Ampelgading," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, Senin (3/11/2025).

Sadono merinci, peristiwa tanah

longsor terjadi di tiga titik berbeda. Di Kecamatan Ngantang, tepatnya di Desa Sidodadi, material longsor sempat menutup akses jalan utama. Kejadian serupa juga terjadi di Kecamatan Dampit, Desa Sumbersuko, di mana satu rumah warga mengalami kerusakan ringan.

Sementara itu, di Kecamatan Ampelgading, tanah longsor melanda Desa Tamanasri dan Desa Argoyuwono. Di Desa Tamanasri, satu rumah dan satu fasilitas umum dilaporkan rusak, sedangkan di Desa Argoyuwono satu rumah warga turut terdampak.

Sedangkan untuk peristiwa banjir, Sadono menyampaikan, kejadian melanda Kecamatan Ampelgading, tepatnya di Desa Lebakharjo. Banjir yang terjadi pada Sabtu (1/11/2025) sekitar pukul 21.30 WIB itu menyebabkan 38 rumah warga tergenang. Dalam kejadian tersebut, dua orang dilaporkan hilang dan hingga kini masih dalam pencarian.

"Saat itu satu keluarga yang mengendarai sepeda motor terjebak banjir di perjalanan dari Tegalrejo

menuju Lebaksari. Air yang semakin deras menyebabkan istri dan anak terlepas dari pegangan sang suami dan hanyut terbawa arus, sementara suami berhasil menyelamatkan diri ke tepi jalan," jelas Sadono.

Menurutnya sampai saat ini, tim gabungan dari BPBD dan BKO Basarnas Malang Raya masih melakukan pencarian terhadap dua korban bernama Rika Yulia dan Aldafistul Rifka Salima di aliran Sungai Glidik.

Selain banjir dan longsor, cuaca ekstrem disertai hujan deras dan angin kencang juga terjadi di Kecamatan Dau, tepatnya di Desa Sumbersekar. Akibat peristiwa itu, dua warga mengalami luka, masing-masing atas nama Sunarti (47) dan Ahmad (51).

"BPBD mencatat sebanyak 7 rumah rusak berat dan 71 rumah rusak ringan di Dusun Krajan. Di Dusun Semanding terdapat 28 rumah rusak sedang dan 24 rumah rusak ringan. Selain itu, poskamling, balai RT, dan masjid di wilayah tersebut juga dilaporkan mengalami kerusakan ringan," ujar Sadono. (Santi/Dya)

Menuju Kota Metropolitan, Walikota Malang: Sudah Masuk 50 Daerah Prioritas Nasional

MALANG- Menuju status sebagai kota metropolitan sekaligus kota pendidikan, Kota Malang kini resmi masuk dalam daftar 50 daerah prioritas nasional. Hal itu ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk periode pembangunan 2025-2029.

"Pak Menteri PU sudah menunjuk 50 daerah sebagai daerah prioritas. Dibagi dalam beberapa kategori, termasuk kota metropolitan, dan salah satunya Kota Malang masuk di situ," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Senin (3/11/2025).

Wahyu menjelaskan, usulan untuk masuk sebagai Kota Metropolitan, sejalan dengan pandangannya selama ini. Menurutnya, Kota Malang layak mendapat perlakuan sebagai kota metropolitan meski jumlah penduduk tetapnya di bawah satu juta jiwa.

Namun, lanjutnya, aktivitas masyarakat serta jumlah warga yang menetap sementara, menunjukkan kapasitas kota ini sudah setara dengan kota metropolitan.

"Kalau dari jumlah penduduknya

memang di bawah satu juta jiwa. Tetapi jumlah orang yang tinggal di sini itu lebih dari satu juta. Karena juga jumlah mahasiswanya hampir 800 ribu. Penduduk kita kurang dari 900 ribu," jelasnya.

Wahyu mengatakan, kondisi tersebut menjadi dasar kebijakan dan perencanaan pembangunan di Kota Malang tidak bisa lagi berbasis pada klasifikasi kota besar. Dengan banyaknya aktivitas dan populasi dinamis, kebijakan perkotaan sudah semestinya diarahkan pada skala metropolitan.

"Selama ini untuk membuat kebijakan dan perencanaan, basisnya kan kota besar. Sehingga banyak hal yang akhirnya tidak dapat kami lakukan. Nah ini yang akhirnya ditangkap oleh pusat, oleh Pak Menteri," katanya.

Pria yang sempat menjabat sebagai Sekda Kabupaten Malang, ini menambahkan, dengan masuknya Kota Malang dalam kategori tersebut, pemerintah pusat kini memberikan perhatian lebih.

Perlakuan terhadap Kota Malang akan disesuaikan dengan karakteristik kota metropolitan, termasuk dalam

hal pengembangan sarana dan prasarana.

Lebih lanjut, selain ditetapkan sebagai kota metropolitan, Kota Malang juga diusulkan menjadi salah satu prioritas sebagai Kota Pendidikan. Usulan ini muncul karena besarnya kontribusi sektor pendidikan terhadap identitas dan dinamika ekonomi kota.

"Nah ini yang akan kami tangkap. Kami akan ke pusat, ketemu dengan PU terkait dengan program prioritas ini agar langkah yang akan kami lakukan bisa ditangkap oleh Kementerian PU dan dilakukan Pemkot Malang," paparnya.

Wahyu menjelaskan, program pembangunan untuk 50 daerah prioritas tersebut akan mulai berjalan pada tahun 2026. "Mulai 2026. Itu sudah disampaikan oleh Pak Menteri



Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. (Santi/Lentera)

PU," kata Wahyu.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, memaparkan rancangan pembangunan 50 kota prioritas nasional dalam periode 2025-2029. Program ini menjadi bagian dari visi strategis Kementerian PU yang disebut PU608, sebagai arah pembangunan nasional menuju tahun 2029. (Santi/Dya)

20 ORANG TEWAS AKIBAT GEMPA 6,3 SR DI AFGHANISTAN

Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang wilayah dekat kota Mazar-e Sharif, Afghanistan utara, pada Senin (3/11/2025) dini hari. Bencana ini menewaskan sedikitnya 20 orang, melukai ratusan lainnya, serta menyebabkan kerusakan pada Masjid Biru yang bersejarah, menurut keterangan pihak berwenang. Jumlah korban jiwa diperkirakan masih dapat bertambah.

Menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), gempa tersebut terjadi pada kedalaman sekitar 28 kilometer di dekat Mazar-e Sharif, kota yang dihuni lebih dari 523 ribu penduduk.

Sedikitnya 20 orang dilaporkan meninggal dunia dan sekitar 320 lainnya mengalami luka-luka, menurut juru bicara Kementerian Kesehatan, Sharfat Zaman. Namun, pejabat setempat memperingatkan bahwa jumlah korban kemungkinan masih akan bertambah seiring tim penyelamat mencapai desa-desa terpencil di provinsi Balkh dan Samangan, dua wilayah yang terdampak paling parah.

Rekaman video yang beredar di media sosial X memperlihatkan petugas tanggap darurat tengah mencari korban selamat di antara puing-puing bangunan. Dalam salah satu video, terlihat tim penyelamat mengevakuasi jenazah dari reruntuhan. Meski demikian, Reuters belum dapat memverifikasi keaslian rekaman tersebut secara independen..

"Tim penyelamat dan kesehatan kami telah tiba di daerah tersebut, dan semua rumah sakit terdekat telah disiagakan oleh pimpinan untuk merawat para korban luka," kata Zaman.

Afganistan Rawan Gempa

Afganistan termasuk wilayah yang rawan gempa, terutama di sepanjang Pegunungan Hindu Kush yang menjadi titik bertemunya lempeng tektonik Eurasia dan India.

Dikutip dari Reuters, gempa bumi menewaskan rata-rata sekitar 560 orang setiap tahun di Afghanistan, dengan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 80 juta dolar AS (sekitar Rp1,27 triliun).

Kajian menunjukkan sedikitnya 355 gempa dengan kekuatan di atas magnitudo 5,0 telah mengguncang Afghanistan sejak tahun 1990.

Jaringan komunikasi dan infrastruktur yang buruk di wilayah pegunungan Afghanistan kerap menghambat upaya penanganan bencana. Kondisi ini membuat pihak berwenang membutuhkan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, untuk mencapai desa-desa terpencil dan menilai tingkat kerusakan.



Seorang petugas penyelamat bekerja setelah gempa bumi terjadi di lokasi yang tidak diketahui di Afghanistan, dalam gambar selebaran yang dirilis pada (3/11/2025). (Foto: Reuters)

Selain itu, banyak rumah di Afganistan dibangun dengan batu bata lumpur, sehingga mudah rusak ketika gempa terjadi. Infrastruktur yang buruk di wilayah terpencil juga

memperlambat upaya penyelamatan setelah bencana alam seperti gempa bumi.

Negara itu kini juga tengah menghadapi berbagai krisis lain,

Masjid Biru Ikonik di Mazar-i-Sharif Rusak Parah



Masjid Biru di Mazar-e Sharif, Afghanistan. (Foto: iqna.ir)

MASJID Biru yang terletak di Mazar-i-Sharif, salah satu landmark abad ke-15 yang terkenal dengan hiasan ubin berwarna-warni, dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 6,3 yang mengguncang wilayah utara Afghanistan pada Senin (3/11/2025) dini hari.

Dikutip dari Reuters dan AFP, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo tersebut terjadi di area sekitar Mazar-i-Sharif, kota berpenduduk sekitar 523 ribu jiwa, pada sekitar pukul 00.59 waktu setempat.

Badan Survei Geologi Amerika

Serikat (USGS) melaporkan bahwa pusat gempa berada pada kedalaman sekitar 28 kilometer di bawah permukaan bumi, di kawasan dekat Mazar-i-Sharif, yang terletak di Provinsi Balkh dan dikenal sebagai kota terbesar kelima di Afghanistan.

Menurut Haji Zaid, juru bicara otoritas Provinsi Balkh yang dikutip dari Sky News, gempa tersebut telah merusak sebagian struktur Masjid Biru, salah satu bangunan paling ikonik di Afghanistan. Tempat ibadah bersejarah ini juga merupakan salah satu dari sedikit destinasi wisata yang masih ada di negara yang telah lama dilanda konflik.

Sementara itu, dikutip dari AFP menyebutkan bahwa bagian-bagian bangunan berornamen, terutama di salah satu menara masjid, terlepas dan berserakan di halaman akibat guncangan gempa tersebut.

Kementerian Pertahanan Afghanistan yang saat ini berada di bawah kendali Taliban melaporkan bahwa Provinsi Balkh dan Samangan menjadi wilayah yang paling parah

termasuk kekeringan parah serta kembalinya jutaan warga Afghanistan dari negara-negara tetangga, menurut laporan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) pada September lalu. (Reuters, USGS, UNHCR, ist/nei)

Gempa Bumi di Afghanistan Tahun 2025

- **3 NOVEMBER 2025**
Gempa berkekuatan 6,3 SR mengguncang Mazar-e Sharif, Provinsi Balkh di Afghanistan utara.
- **31 AGUSTUS 2025**
Guncangan 6,0 SR terjadi di timur Afghanistan, dekat perbatasan dengan Pakistan.
- **12 JUNI 2025**
Gempa 5,7 SR melanda wilayah Provinsi Paktika dan Khost.
- **22 MARET 2025**
Wilayah Provinsi Badakhshan (utara) diguncang gempa 5,9 SR.
- **7 FEBRUARI 2025**
Gempa 5,9 SR terjadi di wilayah Herat, Afghanistan barat.



terdampak akibat gempa, yang menimbulkan sejumlah korban jiwa.

Menurut pernyataan kementerian tersebut, tim penyelamat dan bantuan militer segera dikerahkan ke lokasi terdampak untuk melakukan operasi pencarian dan evakuasi, menolong korban luka, serta memberikan bantuan kepada keluarga yang terkena dampak.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Taliban dalam laporan terbarunya menyebutkan bahwa sedikitnya 20 orang meninggal dunia dan sekitar 320 orang lainnya terluka akibat gempa tersebut.

Juru bicara Kementerian Kesehatan, Sharfat Zaman, menegaskan bahwa jumlah korban jiwa maupun luka-luka masih berpotensi bertambah seiring berjalannya proses penyelamatan. (Reuters, AFP, USGS, ist/nei)

WASPADA! MEMBUNGKUS LONTONG DENGAN PLASTIK BISA PICU KANKER

Pernahkah kamu melihat lontong yang dibungkus dengan plastik? Atau mungkin kamu sendiri masih sering melakukannya di rumah? Jika ya, sebaiknya hentikan kebiasaan tersebut mulai sekarang. Walau tampak praktis dan mudah digunakan, penggunaan plastik sebagai pembungkus makanan yang dimasak ternyata menyimpan bahaya tersembunyi bagi kesehatan.

Meski terlihat efisien, membungkus lontong atau ketupat dengan plastik dapat menimbulkan risiko serius. Sebagian besar plastik tidak tahan terhadap suhu tinggi dan bisa melepaskan zat kimia berbahaya saat terkena panas. Zat tersebut dapat mencemari makanan tanpa disadari, sehingga membuatnya tidak aman untuk dikonsumsi.

Menurut dr. Tan Shot Yen, ahli gizi masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, paparan panas saat proses pengukusan dapat menyebabkan plastik melepaskan zat kimia berbahaya seperti dioksin dan BPA. Zat-zat ini bisa mencemari makanan dan akhirnya terserap ke dalam tubuh saat dikonsumsi. Jika terjadi terus-menerus, paparan bahan kimia tersebut berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari ketidakseimbangan hormon hingga risiko penyakit kronis.

"Plastik yang terpapar panas, terutama jenis tertentu, dapat melepaskan zat kimia berbahaya yang bisa masuk ke dalam makanan dan tubuh, menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan hormonal, masalah reproduksi, dan bahkan risiko kanker," kata dr. Tan dikutip dari Antara. Peringatan tentang bahaya penggunaan plastik untuk makanan juga disampaikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Sementara itu, Agus Haryono yang saat ini menjabat sebagai Deputy Fasilitasi Riset dan Inovasi, plastik untuk kemasan

bahan makanan, seharusnya dibuat berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), agar lebih aman jika berada di suhu tertentu.

Sebab, zat-zat adiktif pada plastik (yang tidak tahan panas), dapat dengan mudah terurai. Jika terkontaminasi ke dalam tubuh, berbagai penyakit seperti kanker dan perubahan hormon dapat membahayakan kesehatan.

Menurut dr. Tan, lontong atau ketupat sebaiknya dibungkus dengan daun, seperti daun pisang atau daun janur kelapa. Selain lebih aman, cara ini juga memberikan aroma khas yang membuat lontong dan ketupat terasa lebih sedap.

Agar kualitasnya tetap terjaga, dr. Tan juga menyarankan untuk menyimpannya di kulkas sebelum dihidangkan kembali. "Menyimpan lontong sebaiknya sama seperti nasi matang. Masuk kulkas dan kukus ulang saat mau makan," katanya.

Alternatif Pembungkus Lain

Untuk mengurangi risiko kesehatan, dr. Tan menyarankan agar masyarakat mulai beralih ke pembungkus makanan yang lebih aman dan alami. Menurutnya, penggunaan bahan sintesis seperti plastik atau kantong kresek saat memasak dapat berisiko karena bahan kimia di dalamnya bisa berpindah ke makanan, terutama pada suhu tinggi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memilih bahan pembungkus tradisional yang lebih ramah kesehatan.

Salah satu alternatif yang direkomendasikan adalah menggunakan daun pisang atau daun janur kelapa sebagai pembungkus lontong dan ketupat. Bahan-bahan alami ini tidak hanya aman untuk makanan, tetapi juga ramah lingkungan karena mudah terurai secara alami. Selain itu, penggunaan daun-daun tersebut juga merupakan bagian dari kearifan lokal yang sudah diwariskan turun-temurun dalam tradisi kuliner Indonesia.

"Membungkus lontong dan ketupat dengan bahan alami seperti daun pisang atau janur kelapa jauh lebih aman untuk makanan, dan juga akan memberi aroma yang khas pada lontong dan ketupat," ungkap dr. Tan. Menurutnya, aroma harum dari daun pisang atau janur yang terkena panas saat dimasak dapat menambah cita rasa dan kelezatan pada makanan, sehingga membuatnya lebih menggugah selera.

Pada momen hari raya, banyak orang biasanya menyimpan lontong atau ketupat untuk dikonsumsi kembali keesokan harinya. Terkait hal ini, dr. Tan menyarankan agar lontong disimpan di dalam kulkas agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga. "Menyimpan lontong sebaiknya sama seperti nasi matang.

Pentingnya Jenis Plastik

Saat memilih kemasan plastik untuk makanan, penting untuk selalu memeriksa label guna memastikan bahwa plastik tersebut aman untuk digunakan dan tahan terhadap panas. Beberapa jenis plastik memang

dirancang memiliki titik leleh tinggi dan dinyatakan food grade, namun tanpa label yang jelas, sulit bagi konsumen untuk mengetahui jenis plastik yang digunakan. Karena itu, demi keamanan, sebaiknya hindari penggunaan plastik apa pun sebagai pembungkus lontong atau ketupat yang akan melalui proses perebusan.

Jenis plastik yang paling perlu dihindari dalam kegiatan memasak, terutama untuk membungkus lontong, adalah plastik dengan kategori LDPE (Low-Density Polyethylene). Plastik LDPE memiliki titik leleh yang relatif rendah, yakni antara 83°C hingga 98°C. Ketika terkena panas tinggi saat proses perebusan, plastik ini dapat mencair dan melepaskan zat kimia berbahaya yang berpotensi mencemari makanan. Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melarang penggunaan plastik jenis ini untuk kegiatan memasak.

Selain LDPE, jenis plastik lain seperti PVC dan PS juga tidak disarankan digunakan untuk membungkus makanan panas karena berisiko melepaskan bahan kimia beracun. Meskipun mungkin terlihat lebih praktis dan mudah ditemukan, penggunaan plastik dalam memasak tetap tidak sebanding dengan potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkannya. Zat-zat kimia dari plastik dapat terakumulasi dalam tubuh dan berdampak buruk dalam jangka panjang, terutama jika dikonsumsi terus-menerus.

Sebagai langkah pencegahan, disarankan untuk membatasi konsumsi lontong, terutama jika diketahui dibungkus dengan plastik. Satu porsi lontong, sekitar 150 gram, sudah cukup untuk sekali makan. Pastikan juga untuk menyimpan lontong yang telah matang di dalam kulkas dan mengukusnya kembali sebelum dikonsumsi. (nei,ist/dya)

AI GLASSES V1 DARI LENOVO TAWARKAN MODE TELEPROMPTER CANGGIH

Perusahaan teknologi Lenovo resmi meluncurkan kacamata berbasis kecerdasan buatan (AI) bernama Glasses V1, yang saat ini dijual secara eksklusif di Tiongkok dengan banderol 3.999 Yuan atau sekitar Rp9 jutaan. Produk ini akan mulai tersedia pada 9 November 2025.

Kacamata pintar ini dibekali berbagai fitur AI, termasuk mode "teleprompter", yang dirancang untuk memudahkan pengguna saat berbicara di depan umum atau membuat konten digital. Fitur tersebut memungkinkan teks atau panduan tampil langsung di layar kacamata, sehingga pengguna dapat tampil lebih natural tanpa harus melihat catatan.

Dilansir dari Gizmochina pada Minggu (2/11/2025) waktu setempat, Lenovo AI Glasses V1 memiliki bobot ringan hanya 38 gram. Perangkat ini menggunakan layar difraksi resin waveguide dengan tingkat kecerahan puncak hingga 2000 nits. Lensa setebal 1,8 mm dengan area pandang 15x11 mm memastikan tampilan visual tetap stabil dan jelas meskipun pengguna sedikit bergerak.

Lenovo menyebutkan bahwa desain Glasses V1 dirancang agar lebih nyaman digunakan, dengan tekanan yang lebih ringan pada hidung dan telinga, sehingga ideal untuk pemakaian harian dalam durasi panjang.

Kacamata ini juga dibekali dua mikrofon dan dua speaker yang memungkinkan pengguna melakukan panggilan hands-free serta menikmati audio stereo yang jernih.

Selain itu, Lenovo menghadirkan asisten pintar bernama Tianxi, yang mampu merespons perintah suara, menerjemahkan secara real time, dan memberikan informasi sesuai permintaan pengguna.

Fitur unggulan lainnya adalah Live Translate, yang memungkinkan terjemahan suara dan teks secara langsung dalam dua bahasa di area pandang pengguna, menjadikannya semacam penerjemah visual interaktif.

Salah satu fitur unggulan dari Lenovo Glasses V1 adalah mode "Teleprompter", yang dapat dipadukan dengan cincin pintar Lenovo. Kombinasi ini memungkinkan pengguna menggulung teks atau mengendalikan slide presentasi tanpa perlu mengalihkan pandangan dari audiens.

Kacamata ini juga memiliki panel sentuh intuitif, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengatur panggilan, membaca pesan, dan mengelola konten di layar.

Selain itu, terdapat sistem navigasi berbasis AI yang memberikan panduan visual dan audio secara langsung (real-time), memungkinkan pengguna untuk mendapatkan instruksi arah maupun informasi lingkungan sekitar dengan akurasi tinggi tanpa perlu melihat layar ponsel.

Namun, untuk saat ini fitur canggih tersebut baru kompatibel dengan perangkat Android, sementara dukungan untuk sistem operasi lain masih dalam tahap pengembangan. Lenovo Glasses V1 juga dilengkapi dengan dua mode tampilan, yakni monokuler dan binokuler, yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan pengguna, baik untuk aktivitas profesional seperti presentasi dan penerjemahan, maupun untuk

hiburan seperti menonton video atau bermain game. Dari segi daya tahan baterai, perangkat ini menunjukkan performa yang cukup impresif.

Dalam mode teleprompter, kacamata ini mampu bertahan hingga 4 jam, sementara pada mode terjemahan dapat digunakan antara 8 hingga 10 jam. Untuk aktivitas intensif seperti pemutaran video dengan tingkat kecerahan dan volume maksimum, daya tahannya mencapai sekitar 2,6 jam. Kelebihan lain terletak pada kemampuan pengisian dayanya. Lenovo Glasses V1 mendukung teknologi fast charging yang memungkinkan pengisian penuh hanya dalam waktu sekitar 40 menit, serta menawarkan waktu siaga (standby) hingga 250 jam, sehingga pengguna tidak perlu khawatir kehabisan daya secara tiba-tiba. Dari sisi konektivitas, perangkat ini mengandalkan Bluetooth 5.4 yang memastikan sambungan lebih stabil, cepat, dan efisien dalam konsumsi energi dibandingkan versi sebelumnya. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Tips Pemula, Bikin Kebun Vertikal Praktis di Lahan Sempit

Keterbatasan lahan di perkotaan sering menjadi kendala bagi mereka yang ingin memiliki kebun sendiri. Namun, hadirnya kebun vertikal atau vertical garden menawarkan solusi praktis dengan memanfaatkan dinding atau struktur bertingkat di area sempit. Selain efisien, metode ini juga mempercantik hunian dan membantu meningkatkan kualitas udara.

Bagi pemula, membuat kebun vertikal mungkin tampak menantang, tetapi dengan panduan yang tepat, siapa pun bisa mewujudkannya. Sistem ini memungkinkan penanaman berbagai jenis tanaman mulai dari sayuran, herba, hingga tanaman hias—tanpa membutuhkan lahan luas.

Artikel ini akan membahas 7 tips penting untuk membuat kebun vertikal di halaman kecil, memberikan inspirasi bagi Anda yang ingin memulai gaya hidup hijau dan berkelanjutan di rumah.

Pilih dengan Cahaya Matahari Cukup

Pemilihan lokasi menjadi langkah penting dalam menciptakan kebun vertikal yang sukses. Faktor utama yang harus diperhatikan adalah paparan sinar matahari, karena setiap jenis tanaman memiliki kebutuhan cahaya yang berbeda.

Jika area yang dipilih kurang mendapatkan sinar matahari, sebaiknya tanam tanaman yang cocok di tempat teduh, bukan tanaman yang memerlukan cahaya langsung. Oleh karena itu, perencanaan lokasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan tanaman agar pertumbuhannya optimal. Pastikan dinding atau area yang digunakan mendapat cukup

cahaya sepanjang hari. Dengan lokasi yang tepat, tanaman akan memiliki energi cukup untuk fotosintesis dan tumbuh sehat dalam sistem kebun vertikal Anda.

Tentukan Struktur Kebun Vertikal

Ada berbagai jenis kebun vertikal yang bisa dipilih, namun bagi pemula disarankan memulai dari desain sederhana agar mudah dibangun dan dirawat. Struktur yang sederhana membantu proses adaptasi sekaligus mengurangi risiko kesalahan di awal.

Salah satu metode yang populer adalah pot gantung berjajar, di mana pot disusun vertikal pada teralis atau pergola dengan pengait dan tali yang kuat. Alternatif lain adalah rak bertingkat dari kayu atau besi yang efisien dalam memanfaatkan ruang dan mudah disesuaikan dengan ukuran halaman.

Metode lain seperti sistem modular vertikal memungkinkan pot-pot disusun menjadi menara tanaman yang rapi, sementara palet kayu daur ulang bisa dimodifikasi menjadi media tanam ramah lingkungan dengan tampilan rustic. Selain itu, pipa PVC berlubang juga sering digunakan karena murah, mudah dirakit, dan cocok untuk menanam sayuran daun atau herba.

Untuk hasil yang praktis dan estetis, gaya kontainer vertikal—tanaman dalam pot yang digantung di dinding atau menggunakan kain felt menjadi pilihan paling mudah diterapkan di lahan sempit. Pendekatan ini efektif menciptakan kebun vertikal yang fungsional, hemat ruang, dan menarik secara visual.

Pilih Tanaman untuk Pemula

Pemilihan tanaman yang tepat menjadi kunci keberhasilan kebun vertikal, terutama bagi pemula. Pilihlah tanaman yang mudah dirawat, tidak membutuhkan ruang akar luas, dan tahan terhadap berbagai kondisi agar proses berkebun lebih menyenangkan dan minim kegagalan.

Untuk sayuran daun, jenis seperti selada, kangkung, bayam, sawi, dan pakcoy cocok karena cepat panen dan hemat ruang. Sementara itu, herba seperti mint, basil, peterseli, kucai, dan jahe juga ideal karena mudah tumbuh serta sering digunakan dalam masakan.

Manfaatkan Bahan Daur Ulang

Menggunakan barang bekas untuk membuat kebun vertikal adalah cara hemat dan ramah lingkungan, terutama bagi pemula dengan anggaran terbatas. Pendekatan ini mendukung prinsip keberlanjutan sekaligus mengurangi limbah.

Botol plastik bekas ukuran 1,5–2 liter bisa dijadikan pot vertikal dengan membuat lubang drainase dan lubang tanam, lalu disusun bertingkat. Kaleng makanan besar pun dapat dimanfaatkan sebagai wadah tanam setelah dibersihkan dan dipasang di dinding.

Selain itu, ban bekas cocok dijadikan pot besar yang kuat dan tahan lama, sedangkan palet kayu bisa diubah menjadi rak atau bedengan vertikal yang menambah nilai estetika kebun. Melalui kreativitas dan pemanfaatan bahan daur ulang, siapa pun dapat menciptakan kebun vertikal yang fungsional, indah, dan berkelanjutan.

Sistem Penyiraman yang Efisien

Pada kebun vertikal, tanaman lebih cepat mengering karena gravitasi mempercepat aliran air ke bawah. Karena itu, diperlukan sistem penyiraman yang efisien agar kelembapan media tanam tetap terjaga.

Salah satu solusinya adalah penggunaan irigasi tetes sederhana atau alat penyiram dengan selang panjang yang dapat menghemat air dan memastikan penyiraman merata.

Selain itu, setiap wadah tanam harus memiliki lubang drainase yang cukup untuk mencegah genangan air dan kerusakan akar. Pada kebun vertikal buatan sendiri, pemasangan talang air di bagian bawah juga disarankan agar air berlebih dapat ditampung dan didaur ulang. Dengan perencanaan penyiraman dan pengelolaan air yang baik, tanaman akan tetap terhidrasi optimal tanpa pemborosan sumber daya.

Siapkan Media Tanam yang Subur

Media tanam berkualitas sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman dalam kebun vertikal. Gunakan campuran tanah subur dan kompos agar akar dan batang tanaman berkembang dengan baik. Kompos membantu meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur, serta menjaga kelembapan.

Untuk hasil optimal, tambahkan sekam padi atau cocopeat guna memperbaiki aerasi dan drainase media tanam. Dengan kombinasi yang tepat, akar tanaman akan mendapat cukup oksigen, terhindar dari genangan air, (nei,ist/dya)

Drama TKA Perdana ...dari hal 1

Tes kemampuan akademik untuk jenjang SMA/SMK/MA pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai diterapkan pada Senin (3/11/2025). Ujian yang dirancang untuk memetakan capaian belajar siswa ini tidak bersifat wajib bagi kelas XII dan tidak memengaruhi penentuan kelulusan. Meski begitu, peserta tetap memperoleh sejumlah manfaat dari keikutsertaan mereka.

Dalam pelaksanaannya, siswa mengikuti rangkaian ujian yang mencakup Bahasa Indonesia selama 45 menit, Matematika selama 50 menit, dan Bahasa Inggris selama 45 menit. Selain itu, peserta juga mengerjakan dua mata pelajaran pilihan, masing-masing berdurasi 60 menit, yang disesuaikan dengan rencana peminatan mereka saat melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Salah satu insiden yang mengejutkan adalah siswa kedatangan melakukan siaran langsung di media sosial ketika ujian berlangsung. Dari pemantauan, beberapa akun sempat terlihat menayangkan proses ujian secara real time sebelum akhirnya dihentikan oleh pengawas.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan tidak akan memberi toleransi atas pelanggaran tersebut. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharuddin, menyebut laporan mengenai peserta yang melakukan live saat ujian langsung ditindak oleh pengawas di lokasi.

"Terima kasih kepada masyarakat yang telah melaporkan dugaan pelanggaran berupa siaran langsung pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di media sosial," ujar Toni dalam keterangan resminya, Senin (3/11/2025).

Ia mengingatkan bahwa aturan mengenai larangan penggunaan gawai telah tercantum jelas dalam Kepmendikdasmen No. 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan TKA.

"Peserta tidak diperbolehkan membawa atau menggunakan gawai selama ujian berlangsung. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, peserta dapat dikenai sanksi berupa pembatalan hasil TKA sesuai dengan tata tertib pelaksanaan," tegas Toni.

Kemendikdasmen kini menelusuri laporan tersebut bersama dinas pendidikan provinsi, kantor wilayah Kemenag, serta panitia pelaksana dan pengawas di daerah.

Menjawab kekhawatiran peserta yang merasa dirugikan akibat beredarnya rekaman soal, Toni

memastikan setiap wilayah dan sesi ujian memakai set soal berbeda. Dengan begitu, tidak ada siswa yang menerima keuntungan dari tindakan membagikan atau menyiarkan soal.

"Kemendikdasmen berkomitmen menjaga integritas dan keadilan dalam setiap pelaksanaan TKA, serta mengajak seluruh peserta menjunjung kejujuran dan sportivitas akademik. Untuk mendukung itu, kami juga membuka posko pemantauan TKA secara daring dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta panitia di berbagai daerah," kata Toni.

Larangan merekam, memotret, atau menyebarkan soal TKA dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Aturan tersebut tidak hanya berlaku bagi peserta, tetapi juga wajib dipatuhi pengawas, proktor, dan teknisi. Sanksinya berjenjang, mulai dari peringatan lisan, surat peringatan, hingga pemberhentian dari tugas sebagai penyelenggara atau penyusun soal.

Bagi siswa, tindak pelanggaran dapat berujung pada pembatalan ujian untuk mata pelajaran terkait hingga penetapan nilai nol setelah melewati proses investigasi oleh penyelenggara tingkat pusat.

Terpisah, Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, meninjau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) hari pertama di SMAN 78 Jakarta, Senin (3/11/2025). Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan ujian berjalan sesuai prosedur, tertib, lancar, dan tanpa kecurangan.

Dalam kesempatan tersebut, Gogot mengingatkan para peserta agar tidak berupaya mencari bocoran soal, karena sistem ujian komputerisasi telah mengacak paket secara otomatis. "Tidak perlu cari bocoran, karena setiap laptop memiliki soal berbeda. Jadi tidak akan ada dua peserta yang mendapat soal sama," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan TKA hari pertama berlangsung mulus, tanpa kendala teknis berarti. Token ujian aktif sejak pukul 07.30 WIB, dan seluruh perangkat dinyatakan siap digunakan. "Kelas sudah kami cek, 100 persen perangkat berfungsi dengan baik," kata Gogot.

Ia menambahkan bahwa sekolah juga menyiapkan sarana cadangan—mulai dari koneksi internet, listrik, hingga laptop pengganti, untuk mengantisipasi gangguan.

Ujian Susulan

Pelaksanaan TKA di empat kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (3/11/2025) harus ditunda akibat pemadaman listrik massal. Kepala Pusat Asesmen

Pendidikan Kemendikdasmen, Rahmawati, menjelaskan bahwa gangguan tersebut dipicu cuaca ekstrem sejak pagi hari di wilayah Indonesia Timur.

"Alhamdulillah pelaksanaan TKA hari pertama secara umum lancar. Kecuali yang di luar kendali kami, misalnya di empat kabupaten di NTT, listriknya padam sejak jam 7 pagi karena badai," ujar Rahmawati dalam Taklimat Media TKA di Jakarta.

Empat daerah yang terdampak adalah Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, dan Belu. Rahmawati menyebut pihaknya segera berkoordinasi dengan PLN untuk memulihkan jaringan listrik, tetapi proses pemulihan memakan waktu lebih lama dari batas toleransi yang diperbolehkan panitia ujian.

Ia memperkirakan sekitar 50 ribu siswa terdampak penundaan tersebut. "Sekitar 50 ribuan, saya belum menghitung pastinya, dari sekolah di empat kabupaten itu," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen, Toni Toharudin, memastikan seluruh peserta yang tidak dapat mengikuti ujian akibat pemadaman listrik akan dijadwalkan ulang. "Kami sudah memutuskan peserta yang terganggu dengan masa waktu itu untuk di-reschedule di ujian susulan tanggal 17 November 2025," kata Toni.

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk menjamin setiap peserta memiliki kesempatan yang adil dalam mengikuti TKA. Toni juga memastikan bahwa ujian susulan akan diawasi secara ketat sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung lancar dan tetap menjaga integritas.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan sesi ujian susulan bagi siswa yang tidak dapat mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) sesuai jadwal. Kebijakan ini diberikan untuk mengakomodasi peserta yang mengalami kendala teknis di sekolah maupun hambatan pribadi, termasuk sakit atau ketidaksiapan pada hari pelaksanaan.

Adapun ujian susulan akan digelar pada 17–23 November 2025. Setelah itu, proses pengolahan nilai dimulai pada 24 November, sementara pencetakan sertifikat direncanakan terbit pada 24 Desember 2025.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan apresiasi atas kelancaran pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) hari pertama untuk jenjang SMA, SMK, MA, dan sekolah keagamaan. Ia menilai penyelenggaraan tes berjalan baik hampir di seluruh daerah.

"Secara umum berlangsung lancar. Hanya ada laporan di Nusa Tenggara Timur ada listrik mati dan tidak siap

dengan genset. Tapi di luar itu, alhamdulillah lancar," ujar Abdul Mu'ti di Tashkent, Uzbekistan, Senin (3/11/2025).

Mu'ti sedang berada di Uzbekistan untuk menyampaikan pidato pada pertemuan UNESCO di Samarkand yang digelar Rabu (4/11). Dalam forum ini, ia dijadwalkan membacakan country statement dalam bahasa Indonesia—momen yang menandai pertama kalinya bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam sidang-sidang UNESCO.

Terkait gangguan pemadaman listrik di NTT, ia menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan kesempatan ujian susulan. "Karena hal itu sifatnya force majeure, maka akan diberikan TKA susulan," tandasnya.

Pada tahun ini, total 3.518.167 siswa kelas XII mengikuti TKA 2025. Mereka berasal dari 43.918 satuan pendidikan, meliputi SMA, SMK, MA, serta sekolah keagamaan dan khusus seperti SMTK, SMA Kristen, SMA Agama Katolik, dan SLB. Pendaftaran peserta sebelumnya ditutup pada 5 Oktober 2025.

Dari seluruh peserta, siswa SMA menjadi kelompok terbesar dengan sekitar 1,75 juta peserta, diikuti SMK sebanyak 1,59 juta siswa, dan MA sekitar 506 ribu peserta.

Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen, Rahmawati, menyampaikan posko pemantauan TKA telah beroperasi sejak malam sebelum pelaksanaan. Posko tersebut siaga penuh selama ujian berlangsung di seluruh zona waktu Indonesia.

"Kami mulai tadi malam. Terus kalau teman-teman waktu Indonesia timur sih dari jam 5 pagi sudah standby," ujar Rahmawati.

Ia menambahkan, evaluasi dilakukan setiap sesi untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai standar. Untuk Informasi dan data lengkap mengenai peserta TKA, lanjut dia, dapat diakses melalui laman resmi tka.kemendikdasmen.co.id.

"Biasanya kami akan evaluasi. Ini teman-teman mungkin bisa cek data ke tka.kemendikdasmen.co.id, karena jumlah peserta dan perjenjangnya lengkap di sana," ujarnya.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharuddin pun mengakui masih kurangnya infrastruktur sekolah dalam pelaksanaan TKA 2025. Khususnya di daerah-daerah yang tertinggal.

Menurutnya, meski sebagian besar sekolah sudah siap, masih ada satuan pendidikan yang perlu peningkatan sarana pendukung. Terlebih peminat TKA perdana ini membludak (ant,rls,wid,ist/dya)



RAPERDA APBD 2026

DPRD JATIM SOROTI PAD, INFRASTRUKTUR HINGGA EFISIENSI

SURABAYA — DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna penyampaian laporan komisi-komisi atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Senin (3/11/2025).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa paripurna ini menjadi momentum penting untuk mendengarkan pandangan komprehensif seluruh komisi terkait arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan Jawa Timur pada 2026.

"Hari ini kita akan mendengarkan pandangan komisi terkait dengan Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, agar hasil yang kita dapatkan bisa komprehensif dan menjawab kebutuhan rakyat," ujar Sri Wahyuni.

Komisi C Tekankan Optimalisasi PAD

Dalam laporannya, Komisi C menyoroti perlunya peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang dianggap memiliki potensi signifikan tetapi belum tergarap maksimal.

Juru Bicara Komisi C, Abdullah Abu Bakar, menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah provinsi memperkuat basis pendapatan lokal.

"Memperhatikan besaran target PAD, Komisi C mendorong Bapenda Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerja melalui program optimalisasi dan inovasi pelayanan pajak daerah, khususnya dalam optimalisasi penerimaan PKB dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan," kata Abdullah.

Ia menjelaskan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak perlu dijalankan secara konsisten dan didukung digitalisasi pengawasan serta pelaporan demi memastikan akurasi data dan transparansi pemungutan pajak.

Komisi C juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah. Sinergi Bapenda, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, dan OPD lainnya dinilai krusial untuk memperluas basis pajak serta meningkatkan ketertiban data wajib pajak.



Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni (tengah) saat memimpin rapat. (Foto-foto: Humas DPRD Jatim)

"Penataan yang lebih tertib serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah diharapkan mampu meningkatkan akurasi data, memperluas basis pajak, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD secara berkelanjutan," tambahnya.

Komisi C juga mengusulkan pengembangan sistem pembayaran pajak digital, integrasi data antarinstitusi, dan pengawasan elektronik guna mencegah kebocoran penerimaan serta mempercepat layanan publik.

Komisi D: Pengembalian Manfaat Pajak

Komisi D menekankan perlunya memastikan hasil pajak daerah kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan transportasi publik.

Juru Bicara Komisi D, Abrari, menjelaskan bahwa struktur APBD 2026 masih menunjukkan ketergantungan tinggi pada pajak daerah.

"Pendapatan Asli Daerah tetap bertumpu pada pajak daerah, dengan kontribusi hampir 50 persen dari total pendapatan atau senilai Rp13,145 triliun. Dari jumlah tersebut, Pajak

Kendaraan Bermotor menjadi tulang punggung utama dengan capaian sekitar Rp4,5 triliun," jelas Abrari.

Mengacu regulasi nasional, ia mengingatkan bahwa 10 persen dari penerimaan PKB dan BBNKB wajib dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan transportasi publik.

"Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib mengalokasikan porsi tersebut dalam APBD 2026 sebagai wujud tanggung jawab fiskal yang berkeadilan, agar pajak yang dibayar masyarakat benar-benar kembali dalam bentuk manfaat nyata, jalan yang lebih baik, transportasi yang lebih layak, dan mobilitas masyarakat yang lebih efisien," tegasnya.

Abrari menilai bahwa pemerataan infrastruktur serta efisiensi transportasi akan memperkuat konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan memperluas akses layanan publik.

"Kita harus mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan daerah dengan menunjukkan bahwa uang pajak mereka bekerja untuk kesejahteraan bersama," ujarnya.

Komisi E Soroti Penurunan TkD

Komisi E menyoroti penurunan alokasi anggaran untuk OPD mitra akibat kebijakan penurunan Transfer ke Daerah (TkD) 2026.

Juru Bicara Komisi E, Rasiyo, menyampaikan bahwa total alokasi anggaran untuk seluruh OPD mitra Komisi E mencapai Rp17,739 triliun atau 62,77 persen dari total pendapatan daerah.

"Meskipun terdapat kebijakan penurunan TkD, Komisi E bersama seluruh OPD mitra berupaya memastikan target kinerja tetap dapat dicapai melalui kebijakan anggaran yang disusun dalam APBD Tahun Anggaran 2026," ujarnya.

Rasiyo menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak boleh menghambat capaian indikator pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ia mengusulkan tambahan anggaran Rp50 miliar kepada Dinas Sosial untuk penguatan Sekolah Rakyat, Program Putri Jawara, KIP Jawara, serta peningkatan layanan sosial UPT Dinsos.

Komisi E juga mengusulkan tambahan Rp18,5 miliar bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, digunakan untuk renovasi BLK Bendul Merisi Surabaya serta pelatihan kerja melalui Mobile Training Unit (MTU).

"Komisi E merekomendasikan tambahan anggaran kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp18,5 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk renovasi Gedung Balai Latihan Kerja Bendul Merisi Surabaya sebesar Rp13,5 miliar, serta pelaksanaan pelatihan kerja melalui Mobile Training Unit sebesar Rp5 miliar," pungkasnya. (Pra,adv/Dya)



Juru Bicara Komisi D, Abrari



Juru Bicara Komisi E DPRD Jatim, Rasiyo



Juru Bicara Komisi C, Abdullah Abu Bakar